



PT. BPR DANA USAHA

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

No. Surat: 025/BDU-Perbarindo/III/2025

Jakarta, 14 Maret 2025

Kepada Yth :

Perbarindo & Majalah Media BPR

Rumah Perbarindo

Komplek Patra II No. 46

Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih

Jakarta Pusat 10510

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola 2024**

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT. BPR Dana Usaha telah melaporkan Laporan Tata Kelola 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR PERBARINDO; dan 1 (satu) kantor media atau majalah BPR sesuai POJK nomor 9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Hormat Kami,



Felicia Heryanto

Direktur BPR Dana Usaha



PT. BPR DANA USAHA

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

No. Surat: 026 /BDU-OJK/III/2025

Jakarta, 14 Maret 2024

Kepada Yth :

Bpk./Ibu Pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kantor Regional 1 (KR-1)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wisma Mulia

JL. Jendral Gatot Subroto

DKI Jakarta

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola 2024**

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT. BPR Dana Usaha telah melaporkan Laporan Tata Kelola 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR PERBARINDO; dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai POJK nomor 9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Hormat Kami,



Felicia Heryanto

Direktur BPR Dana Usaha

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

794650-1-TKBPRKA-R-A-20241231-010201-600010-22012025153049

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

heryanto.felicia@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-22 15:30:49



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Alamat : Jl Gunung Sahari Raya no.6 , Jakarta Pusat 10720

Nomor Telepon : 0216299486

Penjelasan Umum : Pelaporan Tata Kelola Rutin BPR Konvensional PT BPR Dana Usaha

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Wijaya Khoe	Direktur Utama	Direktur Utama
2	FELICIA HERYANTO	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Membuat keputusan Operasional Bank dalam penghimpunan dan penyaluran dana maupun management SDM.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Menindaklanjuti temuan OJK dan rekomendasi Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	LIE HERYANTO	Komisaris Utama	KOMISARIS UTAMA
2	PELITA YANTI, S.Si	Komisaris dan Independen	KOMISARIS DAN INDEPENDEN
Rekomendasi Kepada Direksi			
KOMISARIS MEREKOMENDASIKAN DIREKSI UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN MENCAPAI TARGET RENCANA BISNIS DENGAN EKSPANSI KREDIT SECARA PRUDENT.			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	FELICIA HERYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wijaya Khoe	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan antar sesama Anggota Direksi maupun diantara Direksi dan Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Wijaya Khoe	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FELICIA HERYANTO	tidak ada	tidak ada	Anak Lie Heryanto

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungun keluarga antar sesama Direksi atau antara Direktur Utama dan Pemegang Saham. Direktur adalah anak Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	LIE HERYANTO	4.000.000.000	80,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Lie Heryanto memiliki 80% saham BPR dan menjabat sebagai Komisaris Utama

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	LIE HERYANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	PELITA YANTI, S.SI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan sesama anggota Komisaris maupun antara anggota Komisaris dan Direksi. Tidak ada hubungan keuangan antara Komisaris dan Pemegang Saham lain. Komisaris Utama adalah Pemegang Saham mayoritas BPR Dana Usaha.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	LIE HERYANTO	tidak ada	Direktur Felicia Heryanto sebagai Anak	tidak ada
2	PELITA YANTI, S.SI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Utama, anggota Direksi maupun Pemegang Saham. Komisaris Utama adalah pemegang saham yang anaknya, Felicia Heryanto, menjabat sebagai Direktur BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	388000000	2	225000000
2	Tunjangan	2	36000000	2	30000000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		424000000		255000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	mobil/motor dan bensin	Bensin
3	Asuransi Kesehatan	bpjs kesehatan	bpjs kesehatan
4	Fasilitas lainnya	pulsa telepon, bpjs ketenagakerjaan	pulsa telepon, bpjs ketenagakerjaan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas dibiayakan perusahaan dengan sepengetahuan pemegang saham dan dimana memungkinkan secara reimbursement

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,18	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,01	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,06	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,83	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,10	1
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	24-01-2024	4	Rapat Persetujuan Rencana Bisnis 2024
2	30-06-2024	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 2024
3	31-12-2024	4	Evaluasi Rencana Bisnis 2024
4	31-01-2024	2	Rapat Direksi Januari 2024
5	29-02-2024	2	Rapat Direksi Februari 2024
6	31-03-2024	2	Rapat Direksi Maret 2024
7	28-04-2024	2	Rapat Direksi April 2024
8	31-05-2024	2	Rapat Direksi Mei 2024
9	28-06-2024	2	Rapat Direksi Juni 2024
10	31-07-2024	2	Rapat Direksi Juli 2024
11	30-08-2024	2	Rapat Direksi Agustus 2024
12	30-09-2024	2	Rapat Direksi September 2024
13	31-10-2024	2	Rapat Direksi Oktober 2024
14	29-11-2024	2	Rapat Direksi November 2024
15	31-12-2024	2	Rapat Direksi Desember 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Komisaris dihadiri oleh kedua Direksi dan kedua Komisaris. Rapat Direksi Dihadiri oleh kedua Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	LIE HERYANTO	15	0	100,00
2	PELITA YANTI, S.Si	14	0	93,33

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris hadir selalu dalam rapat dewan komisaris minimum 1 kali setiap 3 bulan.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)								
Tidak ditemukan fraud								

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Dana Usaha dalam proses penyelesaian 1 kasus an. Debitur Riky (sejak akhir Desember 2022) yang rumahnya laku dilelang hak tanggungan guna pertanggungjawaban penyelesaian kredit yang kini telah di tahap Mahkamah Agung per Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya No. 06, Jakarta Pusat 10720

Nomor Telepon : (021)-6299486

Modal Inti BPR : 9.747.422.000,00

Total Aset BPR : 22.714.878.000,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,2

Peringkat Komposit : 1

Analisis : BPR Dana Usaha memiliki predikat Baik dengan nilai komposit 1.1 dengan peringkat komposit 1 dalam Penerapan Tata Kelola di tahun 2024 dan berkomitmen senantiasa memperbaiki nilai ini.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR memiliki 2 orang Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah komisaris sama dengan jumlah direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS secara on-time.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua komisaris tinggal di Jakarta. tempat kantor BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Not Applicable. Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja & mematuhi
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris hanya menjabat di BPR Anugerah Artasentosa Prima dan BPR Dana Usaha
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	50 persen Dewan Komisaris memiliki hub. Keluarga dengan 50 persen anggota Direksi. tdk melanggar POJK Tata Kelola BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Not Applicable. Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar sehingga tidak memiliki Komisaris Independent
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Komisaris mengawasi Direksi dan senantiasa memberikan bimbingan tertulis di Rapat Triwulanan Dekom.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Komisaris mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR oleh Direksi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Komisaris hanya mengetahui sebagian pengambilan keputusan Direksi atas kredit BPR diatas 500 juta dan menasihati dimana diperlukan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris mengingatkan selalu agar Direksi menindaklanjuti temuan audit KAP & OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat Dekom dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan tanggung jawab Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Rapat Dekom bersifat evaluatif, menganjurkan rencana strategis, dan selalu dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan tertulis
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris mengutamakan keuntungan BPR dan hanya menerima honorarium dan fasilitas dari BPR. Rasio BOPO rendah di angka 60
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Komisaris memantau laporan Direksi Kepatuhan yang memerlukan tinjau lanjut kedua Direksi
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat Dekom didokumentasikan secara tertulis setiap 3 bulan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,03	0,03	0,01	0,07	0.010	Terdapat pemisahan tanggung jawab yang jelas antara kedua Direksi yang juga dikawal dengan sistim dual checking untuk menghindari benturan kepentingan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,45	0,10	1,16	0.174	Dewan komisaris aktif mengawasi kinerja Direksi dan memenuhi tanggung jawab rapat dan pelaporan secara rutin
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Not Applicable
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,20	1,60	0.160	Terdapat sistim dual checking dan pemantauan pengambilan keputusan secara jelas dan tercatat pada Aplikasi IT BPR maupun pada Rapat Direksi.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,96	0,13	2,09	0.209	Sistem Keptuhan dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan. PE Kepatuhan akan diangkat secara internal setelah proes merger.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,50	0,13	1,13	0.113	PE Audit Interen memantau transaksi dan pelaporan keuangan BPR dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	AUDIT KAP bekerja secara independent dan professional memeriksa laporan tahunan BPR
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,67	0,80	0,15	2,62	0.262	Prinsip Manajemen Risiko dilakukan oleh setiap lini kerja BPR namun perlu dilakukan pelatihan SDM.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Tidak ada pelampauan atau pelanggaran BMPK dan laporan dilakukan secara rutin dan tepat waktu melalui APOLO
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis di prediksi berdasarkan ekspektasi dan data real. diawasi realisasinya oleh Direksi dan dilaporkan ke OJK secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,50	0,10	1,60	0.120	Kondisi keuangan dan mangement BPR dilaporkan dengan penuh integritas terlihat dari kesehatan rasio dan laba BPR
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Sistem pengambilan keputusan di BPR melalui dua orang pekerja yang tidak memiliki benturan kepentingan. bila ada maka akan dilaporkan ke Direksi. dibahas dan dipertimbangkan sesuai kepentingan perusahaan dengan Komisaris namun belum terdokumentasi.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Komisaris senantiasa mengawasi agar keputusan yang diambil direksi mengutamakan kepentingan BPR. tdk melampaui BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Pengambilan keputusan dgn benturan kepentingan terdokumentasi layaknya hapus buku yang direkomendasikan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direktur Kepatuhan tdk menyalurkan kredit
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direktur Kepatuhan senantiasa mengikuti semua sosialisasi POJK terbaru dan menaatinya
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	3	Sdri. Novia Santi menjabat sebagai PE Kepatuhan APU PP mengundurkan diri Oktober 2023.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan menyusun sebagian besar pedoman kerja & SOP untuk unit kerja BPR
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki SOP PE Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan memenuhi seluruh POJK dan menyampaikan laporan kepada OJK dan otoritas lain (LPS, Pajak, PPATK, BI, dll.)
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Dir. Kepatuhan sudah mensosialisasikan peraturan terkini utk BPR
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direktur Kepatuhan memantau kepatuhan BPR atas komitmen kepada otoritas
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	BPR baru mengkaji kesesuaian pegawai yang akan dilantik sebagai PE Kepatuhan. namun kepastian akan dilakukan ketika BPR Dana Usha merger dengan BPR Anugerah Artasentosa Prima. PE Kepatuhan akan direkrut secara internal.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Direktur Kepatuhan telah mereview sebagian penyempurnaan kebijakan & SOP BPR sesuai peraturan otoritas terkini. BPR belum memiliki PE Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Pelanggaran Pemeriksaan Umum OJK menurun. begitu juga sanksi keterlambatan dari tahun ke tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Dir. Kepatuhan menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sdri. Shervi Hoyusnandar. sebelumnya Pembukuan. menjabat sebagai PE Audit Intern sejak 2017
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	PE AI memiliki sebagian pedoman SOP Audit Intern yang telah dikinikan sesuai peraturan otoritas dan disetujui Direksi dan diketahui Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE Kepatuhan independent terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Dir. Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki PE Audit Intern yang sangat berpengalaman dengan latar belakang 8 tahun pembukuan BPR
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR mempunyai PE Audit Intern yang mematuhi seluruh pedoman berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Not Applicable
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan Audit Intern sepenuhnya memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	PE Audit Intern sudah mengikuti pelatihan terakreditasi
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan Audit Intern telah disampaikan ke Dir. Kepatuhan. Dirut & Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan ke OJK Lap. Pokok-pokok hasil Audit Intern ke OJK on time
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Not Applicable

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern namun bila ada akan disampaikan ke OJK sesuai peraturan berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Audit KAP BPR memenuhi aspek legalitas yang ditentukan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Audit KAP terakreditasi & terdaftar di OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah Lapor
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	KAP memaparkan permasalahan BPR secara on time
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan Hasil Audit sesuai aturan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	4	BPR akan segera memenuhi posisi ini setelah memberikan pengarahannya kepada karyawan pengganti yang dikaji dan diangkat secara internal selama proses merger dengan BPR Anugerah Artasentosa Prima
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki SOP MR
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	BPR belum memiliki kebijakan tertulis pengelolaan Risiko per produk. namun ada SOP per produk
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	BPR memiliki kebijakan dan SOP Manajemen Risiko yg dievaluasi dan disetujui Dekom. Dimana diperlukan persetujuan Komisaris. Direksi melaporkan hal tsb utk menghindari benturan kepentingan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Direksi identifikasi. mengukur. memantau dan mengendalikan mayoritas Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Direksi menerapkan pengendalian intern bagi mayoritas kegiatan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi menerapkan pengendalian intern sesuai POJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Core banking menyediakan data utuh. kini. dan akurat dan di back up setiap hari di DRC
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi memberikan pelatihan kepada PE dan karyawan pelatihan yang dianggap relevan untuk BPR
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR memiliki profil risiko dari sisi Kredit. operasional. kepatuhan. dan likuiditas
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak memiliki produk atau aktivitas baru. bila ada akan dilaporkan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR memiliki dan mematuhi peraturan BMPK yang berlaku dengan monitoring berkelanjutan. tdk ada pelampauan atau pelanggaran BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR evaluasi & mengkinikan keadaan BPR agar tidak menyalahi BMPK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Di tahun 2024 tidak ada pemberian kredit ke pihak terkait dan pemberian kredit maupun penempatan dana simpanan telah memenuhi ketentuan BMPK yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR secara on time memberikan laporan berkala BMPK kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ditemukan pelanggaran BMPK dalam BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Direksi menyusun Rencana Bisnis & disetujui Komisaris selaras dengan visi misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR memiliki cakupan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Pemegang Saham mendukung sepenuhnya penguatan permodalan & infrastruktur BPR dalam RB
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	RB memperhitungkan faktor eksternal. internal. MR & azas kesehatan perbankan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Komisaris mengawasi terlaksananya RB
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR ontime menyampaikan RB pada 2024. terdapat 1x revisi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem informasi manajemen BPR memadai dan SDM BPR kompeten dan terus mengikuti pelatihan hanya yg relevan utk kepentingan bank
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan triwulanan sesuai peraturan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan tahunan sesuai peraturan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR memberikan transparansi lap keuangan secara online. di papan kantor dan dimana dimintakan oleh seluruh stakeholder
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Semua laporan BPR dilaporkan sesuai peraturan. kecuali 1-2x keterlambatan dari 50 jenis laporan wajib
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan ditandatangani Direksi dan disampaikan secara lengkap dan ontime kepada OJK. dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan pengaduan nasabah dilaporkan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Usaha

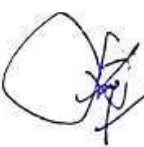
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BPR Dana Usaha ini disusun dan telah disetujui oleh segenap Dewan Direksi dan Komisaris.

Jakarta, 17 Januari 2025

DEWAN DIREKSI PT. BPR DANA USAHA

  
Khoe Kwok Tjhong Felicia Heryanto
Direktur Utama Direktur

DEWAN KOMISARIS

 
Lie Heryanto Pelita Yanti
Komisaris Utama Komisaris

Laporan Tata Kelola PT. BPR Dana Usaha Periode 2024

Kesimpulan Umum

Kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor adalah sbb:

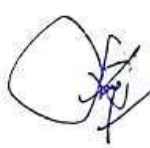
1. Kedua Direksi BPR dinilai berpengalaman, kompeten, melaporkan transparansi keadaan BPR bagi seluruh stakeholders, independent dan berhasil menjalankan tanggung jawabnya masing-masing tanpa overlapping job antara perkreditan oleh Direktur Utama dan Kepatuhan maupun pendanaan oleh Direktur Kepatuhan. Tidak ditemukan pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Namun Direksi masih gagal melakukan ekspansi kredit sesuai rencana bisnis, namun senantiasa menaruh dana idle untuk Kesehatan bank di Deposito dan memaksimalkan LDR sehingga BPR efisien BOPO di angka 66%.
2. Kedua Komisaris BPR dinilai berpengalaman, kompeten, dan mengawasi BPR untuk beroperasi demi kepentingan perusahaan. Komisaris Utama dan Direktur memiliki hub. Keluarga namun sesuai dengan POJK tentang Tata Kelola BPR tidak lebih dari 50% anggota Dewan Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris.
3. Faktor ke 3 Not Applicable karena untuk BPR dengan modal inti paling sedikit IDR 80 Miliar.
4. Benturan Kepentingan di BPR belum memiliki SOP yang memadai namun sistem check & balances antara karyawan, direksi, maupun komisaris telah berjalan dengan baik sehingga BOPO maupun ROA menunjukkan pengutamaan kepentingan BPR diatas kepentingan pribadi. Tidak ada kredit yang disalurkan kepada pihak utama & pihak terkait. BPR juga menyisihkan Sebagian labanya sekitar 10% sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal BPR.
5. Fungsi Kepatuhan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan; BPR belum memiliki PE Kepatuhan karena masih kecilnya jumlah nasabah bank dan rencana pengangkatan PE Kepatuhan untuk mempertahankan jumlah karyawan yang ada dalam proses merger dengan BPR Anugerah Artasentosa Prima. Dengan demikian Direksi komitmen akan melakukan pelantikan PE Kepatuhan setelah terjadinya merger tersebut.
6. Fungsi Audit Intern juga sudah berfungsi kompeten, independent, transparan, dan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara independent. PE Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama.
7. Fungsi Audit Ekstern sudah berfungsi secara independent, kompeten, transparan, dan memberikan rekomendasi, perbaikan, dan penyusunan cakupan laporan sesuai ketentuan OJK yang berlaku. Audit Ekstern adalah pihak independent yang terakreditasi KAP dan terdaftar di OJK.

8. BPR belum memiliki PE Kepatuhan, Manajemen Risiko/APU-PPT sejak November 2023, sehingga Direktur Kepatuhan akan melakukan sosialisasi dan mengangkat karyawan sesuai untuk posisi tersebut di tahun 2025 mendatang. SOP Direktur Kepatuhan dan SOP PE Manajemen Risiko dikinikan sesuai POJK yang berlaku. PE APU PPT bertugas mengawasi. Sebagaimana dijelaskan, Direksi aka melantik PE tsb. Setelah proses merger demi mempertahankan karyawan existing.
Aplikasi Retail BPR user CS/Kasir sudah dikinikan menu profile risiko Nasabah dan dilaporkan secara transparan kepada PPATK dan EOI untuk masalah APU PPT dan perpajakan. Direktur memiliki rincian profil risiko dan menyetujui transaksi diatas nominal tertentu dan dimana ada benturan kepentingan, dilaporkan kepada Komisaris.
 9. Sistem pengawasan, pelaksanaan pemberian kredit, dan pelaporan BMPK pada BPR sudah sesuai peraturan OJK. Tidak ditemukan pelanggaran ataupun pencairan kredit terhadap pihak terkait dan keterlambatan penyerahan laporan self-assessment.
 10. Sistem pelaporan rencana bisnis BPR telah disusun dan dipublikasikan oleh Direksi dengan memperhitungkan faktor ekstern & intern yang akan mempengaruhi kinerja BPR sesuai ketentuan terkini melalui sistem APOLO secara tepat waktu. RBB juga disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk pengawasan dengan tembusan ke Pemegang Saham. Namun ekspansi kredit belum mampu direalisasikan sesuai rencana dan laba rendah.
 11. BPR melakukan sistem pelaporan keuangan dan manajemen kepada pihak otoritas secara transparan dipublikasikan di kantor dan web, juga tepat waktu kepada OJK, PPATK, LPS, dan BI. BPR juga membayar pungutan sesuai tagihan di tahun 2024.
- BPR Dana Usaha memiliki predikat Baik dengan nilai komposit 1.1 dengan peringkat komposit 1 (satu) dalam Penerapan Tata Kelola di tahun 2024 dan berkomitmen senantiasa memperbaiki nilai ini dengan penunjukan PE Kepatuhan/MR/APU PPT di tahun 2025.

JAKARTA, 17 JANUARI 2025

DEWAN DIREKSI

PT. BPR DANA USAHA

  
Khoe Kwok Tjhong **Felicia Heryanto**
 Direktur Utama Direktur

DEWAN KOMISARIS


Lie Heryanto
 Komisaris Utama


Pelita Yanti
 Komisaris